

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki iklim tropis yang hanya mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Beberapa wilayah-wilayah di Indonesia setiap tahunnya memiliki hal yang serupa yaitu dihadapkan dengan masalah yang namanya bencana banjir. Dalam menghadapi musim banjir tersebut, Pemerintah yang merupakan perannya sebagai pelayan masyarakat membuat institusi yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang berdiri pada tanggal 26 Januari 2008. Berikut Landasan Hukum BNPB Berdiri ini mengacu pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 tertanggal pada 26 Januari 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dimana BNPB ini sendiri bertanggungjawab langsung kepada presiden.



Gambar 1. 1

Peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia. Sumber: DIBI, BNPB
(Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB))

Dapat dilihat dari peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia bahwa hampir rata-rata diseluruh provinsi Indonesia rawan bencana banjir. Itu bisa terjadi disaat diawal musim awal penghujan sampai dengan akhir musim penghujan. Menurut Siswoko(2010) Dalam Trihono(2011) itu hampir semua wilayah provinsi di Indonesia akan mengalami yang namanya bencana banjir, tentu saja itu dapat merugikan masyarakat baik kerugian material maupun non material.

Menurut Badan Penanggulangan Nasional Bencana(BNPB) Data perolehan bencana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2016 itu mencapai 1907 kejadian, bencana alam tersebut itu meliputi, letusan gunung berapi, gempa bumi tsunami, bencana banjir, tanah longsor dsb.

Bencana alam terkhusus yang sering dipandang yaitu banjir yang merupakan suatu fenomena bencana alam yang disetiap wilayah di Indonesia ditemui. Banjir merupakan suatu kumpulan air yang meluap dari ketinggian air yang normal, sehingga air tersebut meluap dari tepian sungai hingga sampai ke permukaan tanah dan menyebabkan luapan air di bagian sisi-sisi sungai(Nurjanah,dkk).

Data yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 bencana banjir yang dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia itu merusak pemukiman masyarakat-masyarakat, 2.071 rusak, rusak sedang 1.018 unit, rusak ringan 5.242 unit, dan terendam itu mencapai 214.079 unit, genangan air tersebut juga merusak beberapa fasilitas umum seperti 16 unit fasilitas kesehatan, 277 unit fasilitas pendidikan, dan 199 unit fasilitas . Mengingat juga banjir yang terus menerus setiap tahunnya yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia harus ada pencegahan untuk dampak yang ada, terkhusus untuk warga yang memang tinggal di pemukiman atau wilayah yang sudah teridentifikasi rawan banjir.

Manajemen bencana banjir dalam kata khusus untuk mitigasi, yang bermanfaat untuk pencegahan dampak banjir. Mitigasi ini memang perlu dilakukan dalam pencegahan dampak banjir dan untuk meringankan risiko dalam bencana banjir, dan meningkatkan kekompakan masyarakat baik itu organisasi masyarakat maupun non organisasi dalam penanggulangan banjir. Menurut UU No.24 Tahun 2007 Mitigasi merupakan segelintiran

upaya untuk meningkatkan kegiatan dalam meminimalisir resiko bencana banjir, baik dilakukan dalam kegiatan pembangunan yang bersifat fisik maupun mengajak untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan oleh masyarakat setempat dan meningkatkan pengupayaan siap siaga dalam menyikapi ancaman bencana.

Tugas BNPB Dalam penanggulangan bencana ada berbagai macam:

1. Memberikan pedoman kepada masyarakat tentang ilmu dalam usaha pengupayaan agar tidak terjadinya bencana.
2. Menetapkan standart untuk pengupayaan dalam penanggulangan bencana
3. Menggunakan atau Lembaga yang bertanggung jawab dalam bantuan atau sumbangan baik bantuan nasional maupun internasional.
4. Menyusun pedoman dalam dibuatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD).

Kota Bekasi adalah salah satu wilayah yang bisa dikatakan tinggi untuk bencana banjir .Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kota Bekasi, baik itu kerugian yang bersifat material maupun non material. Pada saat ini pemerintah Kota Bekasi mulai mengevaluasi masalah-masalah yang dialami Kota Bekasi dan Kota Bekasi pun mulai terus mencari titik solusi agar masalah masalah banjir dapat terselesaikan baik.

Tiap-tiap kabupaten & kota yang memiliki angka yang tinggi terhadap rawan bencana wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) di tiap-tiap wilayah. Sehingga tiap-tiap wilayah tersebut memiliki pemimpin atau wadah yang memiliki ahli dalam penanggulangan bencana kota&kabupaten masing masing.

Kabupaten atau Kota yang tidak memiliki angka rawan bencana yang tinggi tidak diwajibkan untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), tetapi lebih disarankan kepada pemerintahnya agar membentuk suatu unit atau bidang yang dikhususkan untuk penanggulangan bencana yang memang dintegrasikan ke dalam salah satu satuan kerja perangkat daerah.

Dalam pembentukan Badan PenanggulanganBencanaDaerah(BPBD), pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota wajib untuk berkoordinir dengan BNPB(Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Kota Bekasi memiliki instansi pemerintah yang bergerak memang untuk

penanggulangan bencana di Kota Bekasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan instansi pemerintahan yang berskala lokal yang dibuat untuk membantu masyarakat khususnya Kota Bekasi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Bekasi. Sampai sejauh ini peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi ini sendiri dari tahun 2015 hingga saat ini itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Kota Bekasi ini sendiri. Dan sampai sejauh ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi ini langsung turun kelapangan dalam penanggulangan bencana di Kota Bekasi tersebut.

Seperti banjir di tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menjadi *leading sector* terhadap bencana banjir yang menimpa Kota Bekasi ini sendiri. Tidak hanya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi pada saat itu diminta juga oleh pemerintah Kota Bekasi ikut ambil andil dalam penanggulangan bencana di Kota Garut, artinya BPBD Kota Bekasi juga turut serta dalam penanggulangan bencana di kota-kota lain di Indonesia apabila memang dibutuhkan. Berikut dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana.
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang badan penanggulangan bencana daerah Kota Bekasi.
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 60 Tahun 2014 Tentang tugas, fungsi, dan tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Bekasi.

Untuk melakukan penanggulangan bencana, BPBD Kota Bekasi mempunyai

Sarana dan prasarana yang mumpuni.hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. 1
Sarana Dan Prasarana BPBD
Kota Bekasi

Sarana dan Prasarana BPBD Kota Bekasi	Jumlah
Helm dan Pelampung	Kurang Lebih 300 Unit
Perahu Karet	24 Unit
Perahu LCR	10 Unit
Dayung	100 Unit
Mesin Tempel	11 Unit
Cancau(Gergaji mesin)	4 Unit
Tenda Pengungsi	7 Unit
Tenda Keluarga	10 Unit
Tenda Pleton	5 Unit
Kendaraan Roda 4	3 Unit
Kendaraan Roda 2	5 Unit
Ranger	1 Unit
Genset	10 Unit
Kompresor	1 Unit
Alat Komunikasi(Holky Talky)	30 Unit

Sumber:Dikelola Oleh Peniliti,2022

Sarana dan prasarana ini merupakan alat yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kota Bekasi untuk operasional.Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kota Bekasi juga

berpendapat bahwa sarana dan prasarana ini masih terbilang kurang, dikarenakan mengingat di Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan. Setiap tahunnya hampir semuanya terdampak banjir di seluruh Kecamatan Kota Bekasi. Selain sarana dan prasarana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi juga mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berpengalaman dalam penanggulangan banjir. Berikut tabel SDM yang dimiliki oleh BPBD Kota Bekasi.

Tabel 1. 2

Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kota Bekasi Tahun 2022

Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kota Bekasi	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16 Orang
Pegawai TKK (Non PNS)	49 Orang
Satgas Lapangan	33 Orang
JUMLAH	98 Orang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD Kota Bekasi ini berkerja dengan efektif dan efisien. tetapi untuk mencakup semua wilayah yang terbilang luas. Yang bisa diketahui bahwa Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan. Hampir rata-rata setiap di musim penghujan itu terdampak bencana banjir. Sehingga para Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD Kota Bekasi tersebut kewalahan, dengan kata lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPBD Kota Bekasi ini kurang personil. Menurut BPBD Kota Bekasi, disetiap tahunnya memang Kota Bekasi hampir di setiap wilayahnya itu terdampak banjir.

Banyaknya titik yang menjadi langganan banjir di kota bekasi.menjadi genangan air jika hujan dengan intensitas yang tinggi membuat Pemerintah kota Bekasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) harus membuat menemukan solusi agar masalah banjir dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat di Kota Bekasi.Hal ini membuat BPBD Kota Bekasi harus mencari solusi dalam menyikapi bencana banjir tersebut.

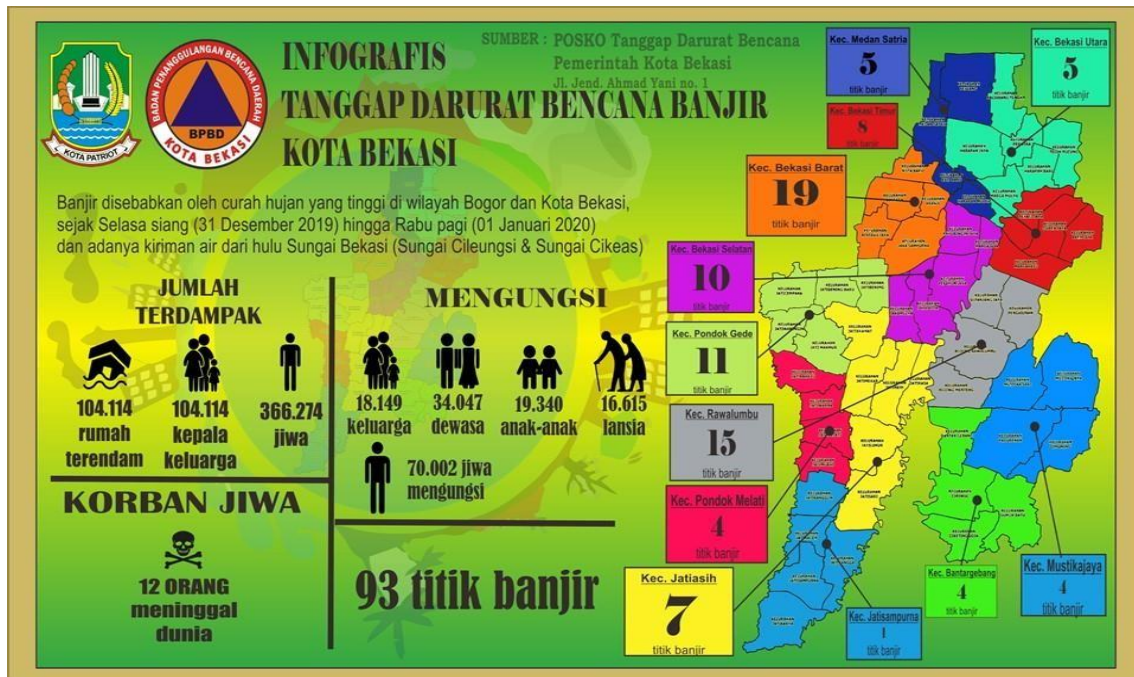
Beberapa permasalahan banjir yang terjadi di Kota Bekasi dapat dilihat dari tabel data luasan banjir di Kota Bekasi tahun 2020-2021 dan infografis tanggap darurat bencana banjir Kota Bekasi tahu

Tabel 1. 3
Data Luasan Banjir Kota Bekasi Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Area pasti yang terkena banjir tahun 2020	Ketinggian Air Banjir Tahun 2020	Area pasti yang terkena banjir tahun 2021	Ketinggian Air Banjir Tahun 2021
RawaLumbu	6 titik	10-80 cm.	31 titik	20-100 cm.
BantarGebang	6titik	20-100cm.	22 titik	10-100 cm.
Mustika Jaya	10 titik	5-180cm.	35 titik	20-110 cm.
Pondok Gede	11 titik	60-200 cm.	34 titik	10-160 cm.
JatiSampurna	6titik	10-30 cm.	9 titik	15-40 cm.
Pondok Melati	1titik	100 cm.	9 titik	10-50 cm.
Medan satria	5 titik	20-50 cm.	16 titik	10-150 cm.
Jati Asih	6 titik	10-200 cm.	45 titik	50-200 cm.
Bekasi Selatan	8titik	20-150 cm.	45 titik	20-120 cm.
Bekasi Timur	11 titik	30-200 cm..	30 titik	20-150 cm.
Bekasi Barat	19 titik	20-90 cm.	42 titik	20-100 cm.
Bekasi Utara	20 titik	10-160 cm.	16 titik	10-150 cm.
JUMLAH	109 TITIK	JUMLAH	334 TITIK	

Sumber: Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Bekasi.

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik banjir yang beradadi kota Bekasi ini memang bervariasi. Mulai dari 10cm.(centimeter) sampai dengan 2,0 meter yang tersebar di 12 kecamatan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Bukan hanya tabel, BPBD Kota Bekasi juga mempunyai Infografis tanggap darurat bencana Kota Bekasi, yaitu:



Gambar 1. 2

INFOGRAFIS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR KOTA BEKASI

(Sumber:Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Kota Bekasi.)

Pada gambar diatas menunjukan infografis tanggap darurat bencana pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2019-2020. Disini menyebutkan bahwa banjir yang menimpa Kota Bekasi ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada wilayah Bogor dan Kota Bekasi sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga 01 Januari 2020. Sehingga menyebabkan luapan air yang cukup signifikan dan adanya kiriman air dari hulu sungai Bekasi(Sungai Cileungsi& Sungai Cikeas).

Banyaknya kiriman air dari hulu sungai Bekasi menyebabkan adanya 93 titik banjir yang diantaranya:

5 Titik banjir di Kecamatan Bekasi Utara,5 Titik banjir di Kecamatan Medan Satria,8 Titik Banjir di Kecamatan Bekasi Timur,19 Titik Banjir Kecamatan Bekasi Barat,10 Titik Banjir di Kecamatan Bekasi Selatan,11 Titik Banjir di Kecamatan Pondok Gede,15 Titik Banjir di Kecamatan Rawalumbu.

4 Titik Banjir di Kecamatan Pondok Melati,7 Titik Banjir di Kecamatan

Jatiasih, 1 Titik Banjir di kecamatan Jatisampurna, 4 Titik Banjir di Kecamatan Bantargebang, dan 4 Titik Banjir di Kecamatan Mustikajaya.

104.114 Rumah terendam banjir yang menyebabkan juga ada 104.114 kepala keluarga terendam banjir dan ada 366.274 jiwa warga Kota Bekasi terdampak Bencana Banjir ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi juga telah menyiapkan pengungsian-pengungsian yang tersebar luas di titik-titik banjir tersebut. Sebanyak 70.002 jiwa yang mengungsi diantaranya 34.047 jiwa dikategorikan dewasa, 19.340 jiwa dikategorikan anak-anak, dan 16.615 jiwa dikategorikan sebagai lansia. Tidak hanya itu, Bencana Banjir yang terjadi pada akhir tahun 2019 hingga 2020 ini juga menelan korban jiwa sebanyak 12 orang meninggal dunia. Pihak BPBD juga berkerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi terus melakukan evaluasi-evaluasi setiap tahunnya guna menekan korban-korban yang tertimpa bencana banjir tersebut.

Berdasarkan tabel data luasan banjir Kota Bekasi 2020-2021 dan infografis tanggap darurat bencana banjir Kota Bekasi 2019-2020 di atas menunjukkan bahwa titik-titik banjir yang berada di kota Bekasi ini memang bervariasi mulai dari 10 cm (centimeter) sampai dengan 2,0 meter di 12 kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi.

Beberapa permasalahan bencana banjir yang dialami oleh Kota Bekasi membuat BPBD Kota Bekasi mempunyai beberapa permasalahan diantaranya:

1. Adanya peningkatan diseluruh wilayah banjir di Kota Bekasi yang lumayan signifikan di semua wilayah yang diseluruh kecamatan Kota Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas.
2. BPBD Kota Bekasi tidak dapat menangani titik-titik banjir secara bersamaan di Kota Bekasi, berdasarkan tabel luasan banjir di Kota Bekasi di berjumlah 331 titik banjir dan dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu berjumlah 33 orang yang menjadi Satgas Lapangan BPBD Kota Bekasi tidak bisa menangani wilayah titik banjir secara bersamaan.
3. BPBD Kota Bekasi mempunyai sarana dan prasarana yang masih kurang memenuhi untuk mengcover titik banjir, seperti helm dan pelampung untuk pengevakasian banjir berjumlah 300 unit, tenda pengungsian untuk korban banjir berjumlah 7 unit dan sarana prasarana yang lainnya yang unitnya

minim. Berdasarkan tabel luasan banjir ada 334 titik banjir di seluruh wilayah Kota Bekasi di waktu yang bersamaan. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa BPBD Kota Bekasi memang mengalami masalah dalam upaya penanggulangan bencana banjir yaitu, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Bekasi.

Permasalahan tersebut diduga karena BPBD Kota Bekasi :

1. BPBD Kota bekasi memiliki kendala yaitu dari tahun 2017 hingga 2022, BPBD Kota Bekasi belum melakukan penambahan atau perekrutan terhadap Satgas Lapangan. Menurut Aditya Dwi Prabowo selaku ketua bidang pusat data dan informasi BPBD Kota Bekasi mengkonfirmasi memang dari 5 tahun kebelakang BPBD Kota bekasi memang belum melakukan penambahan dan perekrutan pada Satgas Lapangan. Sehingga BPBD Kota Bekasi kewalahan dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Bekasi sekarang jika dibandingkan wilayah kota Bekasi yang mencakup 12 kecamatan.
2. BPBD Kota bekasi belum melakukan penambahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD kota bekasi. menurut Aditya Dwi Prabowo selaku ketua bidang pusat data dan informasi BPBD kota Bekasi, BPBD Kota Bekasi belum menambah sarana dan prasarana seperti helm dan pelampung, perahu karet, tenda dll. Sehingga BPBD Kota Bekasi kewalahan dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Bekasi sekarang jika dibandingkan wilayah kota Bekasi yang mencakup 12 kecamatan.

Dari uraian tersebut perlu adanya penelitian yang akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BEKASI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA BEKASI.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana BPBD Kota Bekasi menanggapi kasus bencana banjir yang berada di kota Bekasi?

1. Bagaimana Peran BPBD Dikota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir dikota Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh BPBD Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Bekasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peranan BPBD Kota Bekasi dalam penanggulangan banjir di Kota Bekasi.
2. Untuk Mengatahui hambatan yang dialami oleh BPBD Kota Bekasi saat melakukan penanggulangan banjir di Kota Bekasi.
3. Untuk Mengetahui Upaya BPBD Kota Bekasi dalam penanggulangan banjir di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis, Antara Lain:

1.4.1 Signifikansi Penelitian

Bedasarkan pengamatan dan penelitan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan penelitian tentang: "Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bekasi dalam penanggulangan banjir di Kota Bekasi" diharapkan sekali dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi yang diambil dalam penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

Tabel 1. 4
Tabel Signifikansi Akademik

No	Judul	Peneliti	Hasil	Keterangan
1	Peran BPBD dalam Pencegahan Banjir Kota Padang	HT Tasman,2022	Pengupayaan BPBD Kota Padang dalam pencegahan banjir yang ada dipadang dengan metode Pemberdayaan sumber daya dengan perhitungan skala prioritas.	Jurnal
2	Efektivitas Peran Relawan Penanggulangan Bencana Pada tanggap darurat Jakarta Timur dalam rangka penyelamatan korban manusia (Studi kelurahan Kampung Melayu tahun 2014	BA Sujanto,2017	Untuk mengetahui peran internal dan eksternal,serta para relawan dalam rangka penyelamatan korban manusia.	Jurnal
3	EVALUASI KEBIJAKAN POLA RUANG	M Rachmatullah, OHA Rogi, S Tilaar, 2016	Untuk mengetahui zona resiko terhadap	Jurnal

	DAN STRUKTUR RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA BANJIR (Studi Kasus: Kota Palu)		bencana dan menentukan mitigasi bencana yang tepat.	
4	Peranan Pemerintahan Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir di Tahun 2020	Chridawati Angrelia, Rendy prihasta, Anjas Chusni Mubarak.	Mengkaji peranan pemerintahan kota Tangerang dalam penanggulangan dan pencegahan banjir pada tahun 2020.	Jurnal
5	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng	Nasyiruddin, Muhammadijah, Muhammad Yusuf Badjido.	Membahas mengenai strategi penambahan sarana dan prasarana dalam penanggulangan banjir di kabupaten Bantaeng.	Jurnal
6	Strategi Kebencanaan Di Kota Semarang (Studi Banjir dan Rob)	Inne Septiana Permatasari, 2012	Untuk membahas mengenai keberhasilan penunjang strategi kebencanaan	Jurnal

			banjir dan rob di kota semarang.	
7	Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Sri Heryati,2020	Untuk mengetahui aspek-aspek yang menunjang keberhasilan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.	Jurnal
8	Studi kajian peran BPBD dan Aisyyah disaster action dalam upaya pengurangan resiko bencana di Surakarta.	Rina Sri Widayawati, Wahyuni, 2020	Untuk mengkaji beberapa wilayah rawan bencana di wilayah Surakarta	Jurnal
9	Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat	Dea Riska,(2020)	Untuk Mengetahui peran BPBD Kota Jakarta untuk mengkoordinir dan merehabilitasi terhadap bencana kebakaran di krukut	Jurnal
10	Manajemen Penanggulangan Bencana	I.Khambali,2017	Memberikan pengetahuan berupa upaya,strategi, dan mitigasi	Buku

			bencana berlaku di pra bencana maupun pasca bencana.	
--	--	--	---	--

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2022

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Disamping itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memberikan gambaran-gambaran ilmu baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi”. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada masyarakat banyak. Untuk BPBD Kota Bekasi sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau wawasan untuk evaluasi kinerja BPBD Kota Bekasi supaya lebih optimal penanggulangan-penanggulangan bencana banjir di Kota Bekasi kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain

- BAB I, berisikan Pendahuluan. Dimana Penulis menguraikan latar belakang masalah itu timbul, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, signifikansi praktis, dan sistematika penulisan
- BAB II, berisikan tentang Landasan Teori adalah, bab yang menguraikan dan menjelaskan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan sumber lainnya seperti definisi-definisi, kerangka pemikiran, asumsi penelitian, dan perspektif teoritik.
- BAB III, berisikan tentang Metodologi Penelitian, adalah paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan Teknik pengambilan sampel dan

data, uji keabsahan data,tempat dan waktu penelitian,jadwal penelitian,sertaketerbatasan penelitian.

- BAB IV, Pembahasan, yaitu berisikan tentang bahasan gambaran objekpenelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh
- BAB V, Penutup ,adalah bab yang berisikan kesimpulan dari semua hasilpenelitian dan saran hasil penelitian.